

	News Title : Bappebti Beri Izin 28 Perusahaan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto	
	Media Name : Jurnas.com	Journalist : Supianto
	Publish Date : 07 April 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Izin Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Bappebti Beri Izin 28 Perusahaan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto

Supianto | Jurnas.com, 07/04/2023 09:05 WIB



Ilustrasi - Koin mata uang kripto. (Foto: iStockphoto)

JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), **Didid Noordiatmoko** mengatakan pihaknya telah memberi izin 28 perusahaan calon pedagang fisik aset kripto.

"Masyarakat dapat bertransaksi aset kripto melalui 28 perusahaan yang telah mengantong izin dari Bappebti. Sehingga, ini sudah jelas legalitasnya," jelas Didid dalam siaran resminya diterima, Jakarta, Jumat (7/4).

Jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan ada 383 dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang harus diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Perusahaan calon pedagang aset fisik kripto yang telah terdaftar di Bappebti yaitu PT Indodax Nasional Indonesia, PT Crypto Indonesia Berkat/Tokocrypto, PT Zipmex Exchange Indonesia, PT Indonesia Digital Exchange, PT Pintu Kemana Saja, PT Luno Indonesia LTD, PT Cipta Koin Digital, PT Tiga Inti Utama, dan PT Upbit Exchange Indonesia.

Selanjutnya PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Trinita Investama Berkat, PT Plutonext Digital Asset, PT Galad Koin Indonesia, PT Kripto Maksima Koin, PT Mitra Kripto Sukses, PT Pantheras Teknologi International, PT Aset Digital Indonesia, dan PT Pedagang Aset Kripto.

- Baca juga :
- [Bappebti Akan Ukur Indeks Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi](#)
 - [Bappebti Akan Terbitkan Koin Kripto Baru, Karya Anak Bangsa](#)
 - [Amanat UU, Menteri Teten Minta Kredit Macet UMKM Dihapus](#)

Kemudian PT Tumbuh Bersama Nano, PT Utama Aset Digital Indonesia, PT Coinbit Digital Indonesia, PT Kagum Teknologi Indonesia, PT Bumi Santosa Cemerlang, PT Gudang Kripto Indonesia, PT Ventura Koin Nusantara, PT Sentra Bitweve Indonesia, PT CTXG Indonesia Berkarya, dan PT Cyrameta Exchange Indonesia.

Didid menjelaskan, perdagangan fisik aset kripto menjadi salah satu bagian dari perdagangan berjangka yang diawasi Bappebti. Hal ini berlaku sejak disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

"Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang saat ini berkembang, sangat kompleks dan memiliki sifat *high risk high return*, sehingga diperlukan tata kelola dan pengaturan yang baik. Perdagangan berjangka juga perlu diatur dalam rangka melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi semua pihak yang terlibat," jelas Didid.

Menurut Didid, menghadapi tantangan teknologi rantai blok (blockchain), aset kripto dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan. Untuk itu, pada tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**UU P2SK**).

"Keberadaan **UU P2SK** ini memiliki tujuan yang forward looking, mengantisipasi risiko masa depan, perlindungan konsumen/investor," kata dia.

Beberapa ruang lingkup yang diatur dalam UU ini antara lain penguatan kelembagaan sektor keuangan; penguatan tata kelola keuangan; dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan; perlindungan konsumen; serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran Bappebti dalam tata kelola perdagangan aset kripto akan berpindah menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan masa transisi dua tahun.

Melihat peminat aset kripto yang terus meningkat serta perkiraan berakhirnya crypto winter pada 2024, pemerintah harus optimis perdagangan aset kripto akan semakin berkembang. Melalui **UU P2SK**, diharapkan koordinasi dan penguatan peran kementerian dan lembaga terkait dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik.

"Masih berkaitan dengan **UU P2SK**, Bappebti akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai amanat UU Nomor 4 Tahun 2023. Penyusunan RPP khususnya terkait masa transisi pengalihan pengawasan derivatif keuangan dan aset kripto," ungkap Didid.